

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang didirikan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, Entitas berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok – Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Arah Kebijakan dan strategis Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Program pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang yang bertujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaannya.
2. Program pemangkuan, pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional guna meningkatkan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
3. Program pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, partisipasi, kesadaran dan kesejahteraan masyarakat didalam dan sekitar kawasan konservasi dalam mengelola kawasan konservasi perairan nasional.

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan

implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Menurut Permen KP Nomor Per. 65/MEN/ 2020 J.O. Permen KP Nomor Per. 37/MEN/ 2021 organisasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKN) Kupang terdiri dari : Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Kepala Balai setingkat eselon III, dengan rincian sebagai berikut:

Subbagian Umum ; mempunyai tugas Subbagian Tata Usaha ; mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pelaporan BKKN;

Kelompok Jabatan Fungsional ; mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pengawasan

kawasan konservasi perairan, serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Modul *General Ledger* Pelaporan (GL-P) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pelaporan Keuangan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terdiri dari Modul *General Ledger* – Pelaporan (GLP), Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan yang dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Aset tetap dan Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya

pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola

Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,

aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70
------------------------------	----

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang memperoleh alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 23.005.128.000. Anggaran terdiri dari 3 (tiga) sumber dana yakni Rupiah Murni senilai 16.292.329.000, PNPB TA Berjalan 800.000.000 dan Pinjaman Luar Negeri senilai 5.912.799.000 (\$ 404.987). Selama Tahun 2024 telah dilaksanakan 7 kali revisi DIPA dengan detail revisi sebagai berikut:

No.	Revisi ke	Tanggal Pengesahan	DIPA Awal	DIPA Perubahan	Alasan Revisi
1	01	25 Januari 2024	17.082.329.000	17.082.329.000	pencantuman blokir Automatic Adjustment dalam Catatan Halaman IVA DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut - BKKPN Kupang
2	02	19 Februari 2024	17.082.329.000	17.082.329.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
3	03	24 April 2024	17.082.329.000	17.082.329.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
4	04	31 Mei 2024	17.082.329.000	17.082.329.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
5	05	3 Juni 2024	17.082.329.000	17.082.329.000	- Penyamaan Data Revisi POK; - Update Halaman III DIPA; - Optimalisasi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Satker
6	06	12 Juli 2024	17.082.329.000	17.082.329.000	- Penyamaan Data Revisi POK; - Update Halaman III DIPA; - Optimalisasi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Satker
7	07	22 Agustus 2024	17.082.329.000	22.995.128.000	- Penambahan pagu yang bersumber dari PHLN - KRO (baru) Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem; - Update Halaman III DIPA;
8	08	11 Oktober 2024	22.995.128.000	22.995.128.000	- Penyamaan Data Revisi POK; - Update Halaman III DIPA.
9	09	14 November 2024	22.995.128.000	23.005.128.000	- Perubahan besaran pagu belanja Pegawai - Penambahan KRO (baru) belanja modal Gedung dan Bangunan Layanan Sarana dan Prasarana Internal
10	10	18 November 2024	23.005.128.000	23.005.128.000	- Pencantuman blokir Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya - Kebijakan S-1023/MK.02/2024
11	11	12 Desember 2024	23.005.128.000	23.005.128.000	- Pergeseran POK berupa Penyesuaian pagu minus pada belanja pegawai; - Update Halaman III DIPA.
12	12	27 Desember 2024	23.005.128.000	23.005.128.000	- Penyamaan Data Revisi POK; - Update Halaman III DIPA.

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	1.354.900.000	1.354.900.000
Jumlah Pendapatan	1.354.900.000	1.354.900.000
Belanja		
Belanja Pegawai	7.969.000.000	7.829.000.000
Belanja Barang	9.113.329.000	14.524.248.000
Belanja Modal	0	651.880.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	17.082.329.000	23.005.128.000

Realisasi

Pendapatan Rp

4,133,213,817

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp 4,133,213,817** atau mencapai **305,06%** persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp 1,354,900,000** Rincian pendapatan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	1.354.900.000	4.114.560.000	303,68%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	15.212.190	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3.441.627	
Jumlah	1.354.900.000	4.133.213.817	305,06%

Realisasi Pendapatan Tahun 2024 mengalami kenaikan **69,88** persen dibandingkan Tahun 2023 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	4.133.213.817	2.433.018.634	69,88
Pendapatan Jasa Lainnya			
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya - 425629	4.114.560.000	2.369.683.750	73,63
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN Iuran Badan Usaha dan			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin - 425122	15.212.190	62.034.884	(75,48)
Pendapatan Lain-lain			
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu - 425912	3.441.627	1.300.000	164,74
Jumlah	4.133.213.817	2.433.018.634	69,88

1. Pendapatan jasa lainnya - Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (Kode Akun 425629) mengalami kenaikan sebesar 73,63% dibanding tahun 2023. Nominal pendapatan dominan berasal dari pungutan Karcis Masuk Pariwisata Alam Kawasan Konservasi Perairan (Domestik & Mancanegara) beserta Sarana yang dibawa, Tanda Masuk Pendidikan dan Tanda Masuk Penelitian di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang rentang periode 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024.

Peningkatan pendapatan dibanding tahun 2023 disebabkan antara lain:

- Berakhirnya masa pandemic Covid-19 dan beralih ke masa Endemi, sehingga wisatawan bisa dengan mudah melakukan kunjungan ke Indonesia/ Daerah lain. Hal tersebut berdampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Taman Wisata Perairan seperti di Gili Trawangan, Matra, Aer dan di Kawasan KKPN Lain seperti Laut Banda dan Raja Ampat (Wayag, Waigeo).
- Penerapan tarif penuh sesuai dengan PP 85 tahun 2021 pasca pandemi per tanggal 21 Desember 2023.
- Komitmen organisasi untuk meningkatkan pendapatan dengan menambah Gerai Pelayanan serta penambahan SDM Tenaga Pelayanan yang ditempatkan pada Pos-pos pintu masuk Kawasan Konservasi Perairan Nasional seperti di TWP Gili Matra, TNP Laut Sawu dan SAP Raja Ampat dan Waigeo Sebelah Barat.

Rekapitulasi Capaian Pendapatan Jasa Lainnya sebagai berikut:

No.	Kawasan	Jenis Pungutan					Nominal
		Karcis Masuk PAP			TM Pendidikan	TM Penelitian	
		Domestik	Mancanegara	Sarana yang Dibawa			
1	TNP Laut Sawu	160.000	13.100.000	13.875.000		5.100.000	32.235.000
2	TWP Gili Matra	8.850.000	3.416.400.000	4.150.000			3.429.400.000
3	TWP Kapoposang	2.280.000	1.800.000	2.485.000		5.700.000	12.265.000
4	TWP Laut Banda	920.000	4.200.000	10.830.000			15.950.000
5	TWP Kep. Padaido	390.000	1.700.000	710.000			2.800.000
6	SAP Raja Ampat	50.000	9.400.000	21.060.000		100.000	30.610.000
7	SAP Waigeo	2.240.000	302.000.000	287.060.000			591.300.000
8	SAP Aru Tenggara						-
TOTAL		14.890.000	3.748.600.000	340.170.000	-	10.900.000	4.114.560.000
		Rp4.103.660.000					
Prosentase Besaran PNBP Per Jenis Pungutan		99,74%			0,00%	0,26%	
		0,36%	91,11%	8,27%			

2. Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (Kode akun 425122) berasal dari hasil penjualan peralatan dan mesin yang dihapuskan melalui mekanisme lelang oleh KPKNL dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penjualan BMN berupa 1 Unit Sepeda Motor Honda NF 100 SE dengan kondisi rusak berat senilai Rp.4.625.000 dengan NTPN AF3023CIFKRVDBJ8 NTB 241204038098 tanggal 4 Desember 2024 Risalah Lelang nomor 426/14.05/2024-01 tanggal 4 Desember 2024
- 2) Penjualan 1 unit scrap/ limbah padat survey boat senilai 2.048.883 dengan NTPN 386F00NA055256O3 NTB 241213075334 tanggal 13 Desember 2024 dengan Risalah Lelang nomor 2106/15.02/2024-01 tanggal 11 Desember 2024
- 3) Penjualan 1 unit alat angkutan apung, Kapal TWP Padaido (speed boat) senilai 4.784.933 dengan NTPN 3B15C7QLUPO8D1FQ, NTB 241216017328, Risalah Lelang nomor 189/17.04/2024-01 tanggal 12 Desember 2024
- 4) Penjualan 1 unit sepeda motor NF 12A1CF M/T tahun 2012 senilai 3.100.000 dengan NTPN C5B0A6U8EV5UC78L, NTB 078229670497, Risalah Lelang 742/14.03/2024-01 tanggal 18 Desember 2024
- 5) Penjualan 1 paket inventaris kantor berupa peralatan dan mesin kondisi rusak berat senilai 653.374 dengan NTPN 1C4136U8EV2LHA4P, NTB 599157432800, Risalah Lelang nomor 218/17.01/2024-01 tanggal 8 November 2024

3. Pendapatan Lain-Lain - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (Kode Akun 425912) yang berasal dari Pengembalian Belanja Tahun Anggaran yang lalu. Transaksi berasal dari Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri tahun 2023 nomor kuitansi 03694/KW/499352/2023 dengan NTPN E842F6U8EV35DCUJ dan NTB 983057585280 senilai 3.441.627.

Realisasi Belanja
Negara. Rp
22,784,369,337

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp 22,784,369,337 atau 99,09 % dari anggaran belanja sebesar Rp 23,005,128,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	7.829.000.000	7.811.321.421	99,77%
Belanja Barang	14.524.248.000	14.331.874.400	98,68%
Belanja Modal	651.880.000	651.880.000	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	23.005.128.000	22.795.075.821	99,09%
Pengembalian		10.706.484	0,00
Jumlah	23.005.128.000	22.784.369.337	99,04%

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami **penurunan sebesar (7,87)** persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023. Penjelasan penurunan realisasi belanja secara umum dijelaskan sebagai berikut:

- Dari ketiga jenis belanja, realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 10,26%. Hal tersebut merupakan dampak dari kenaikan besaran gaji pokok sebesar 8% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang aktif per 1 Januari 2024. Selain itu terdapat penambahan 2 PPPK Jabatan PELP Ahli Pertama dan APJK Ahli Pertama yang aktif pada tanggal 1 Februari

2024.

- b. Penurunan realisasi Belanja Barang sebesar 2,16% diantaranya diakibatkan dari komposisi anggaran belanja barang tahun 2024 yang lebih rendah dibanding tahun 2023 yakni 14,524,248,000 dan 15.284.512.000. Pada 2024 terdapat pagu blokir non AA pada Klasifikasi Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen Internal – RO: Layanan BMN sebesar 39.740.000 serta blokir Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya (pembatasan akun perjalanan dinas - Kebijakan S-1023/MK.02/2024) sebesar 126.511.000 yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yang tidak optimal;
- c. Komposisi Anggaran Belanja Modal tahun anggaran 2024 yang lebih rendah dibanding tahun 2023 yakni sebesar 651,880,000 dan 3,012,100,000.

Pengembalian Belanja sampai dengan 31 Desember 2024 berupa Belanja Pegawai dan Belanja Barang senilai Rp. 10,706,484 dengan detail sebagai berikut:

Akun	Uraian	Nominal	Tanggal	Bukti
511119 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Bulan Januari s/d Februari 2024 untuk 46 Pegawai	1.674	15 March 2024	SP2D Nomor 240391303001867 SPM 112
511119 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Kekurangan Gaji Bulan Januari s.d. Bulan Februari untuk 1 Pegawai	18	15 March 2024	SP2D Nomor 240391303001870 SPM 115
512411 - Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja)	Pengembalian lebih bayar tunjangan kinerja pada pegawai BKKPN Kupang TA 2024	1.297.611		
523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pengembalian lebih bayar pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan pada BKKPN Kupang tahun 2024	7.892.181		
521211 - Belanja Bahan	Pengembalian lebih bayar pembelian bahan konsumsi pada BKKPN Kupang tahun 2024	1.515.000		
		10.706.484		

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	7.810.022.118	7.083.561.725	10,26
Belanja Barang	14.322.467.219	14.638.072.044	(2,16)
Belanja Modal	651.880.000	3.009.674.160	(78,34)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Jumlah	22.784.369.337	24.731.307.929	(7,87)

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 7,810,022,118** dan **Rp 7,083,561,725**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai diperuntukan untuk membayar gaji pegawai BKKPN Kupang sebanyak 49 orang PNS dan 3 orang PPPK. Realisasi belanja TA 2024 mengalami **kenaikan 10,27** persen dari TA 2023. kenaikan besaran gaji pokok sebesar 8% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang aktif per 1 Januari 2024. Selain itu terdapat penambahan 2 PPPK Jabatan PELP Ahli Pertama dan APJK Ahli Pertama yang aktif pada tanggal 1 Februari 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.943.623.859	6.659.861.889	4,26%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	324.441.562	47.073.836	589,22%
Belanja Honorarium	-	-	0,00%
Belanja Lembur	543.256.000	376.626.000	44,24%
Jumlah Belanja Kotor	7.811.321.421	7.083.561.725	10,27%
Pengembalian Belanja Pegawai	1.299.303	1.110.761	17%
Jumlah Belanja	7.810.022.118	7.082.450.964	10,27%

Terdapat pengembalian belanja pegawai yang berasal dari:

1. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS senilai Rp.1.674

atas SPM Nomor 00112T/499352/2024 tanggal 14 Maret 2024 “Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Bulan Januari 2024 s.d Februari 2024 untuk 46 Pegawai” dengan nomor SP2D 240391303001867 tanggal 15 Maret 2024.

2. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS senilai Rp.18 atas SPM Nomor 00115T/499352/2024 tanggal 14 Maret 2024 “Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Kekurangan Gaji Bulan Januari s.d. Bulan Februari untuk 1 Pegawai” dengan nomor SP2D 240391303001870 tanggal 15 Maret 2024
3. Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) senilai 1,297,611 yang berasal dari pengembalian lebih bayar tunjangan kinerja beberapa pegawai BKKPN Kupang rentang periode Januari sd September 2024 dengan rincian bukti sebagai berikut:
 - 1) Pengembalian akun belanja 512411 dengan NTPN F45A56QT9KGS AO4P, NTB 474520787137 senilai 146.490 tanggal 25 Oktober 2024;
 - 2) Pengembalian akun belanja 512411 dengan NTPN 7627F7NAPF38NO5F, NTB 147235062931 senilai 10.534 tanggal 25 Oktober 2024;
 - 3) Pengembalian akun belanja 512411 dengan NTPN 86E6A7NAPF38NO5L, NTB 506362795726 senilai 157 tanggal 25 Oktober 2024;
 - 4) Pengembalian akun belanja 512411 dengan NTPN 7807E45KQ5HRL2DD, NTB 641720021978 senilai 1.043.932 tanggal 4 November 2024;
 - 5) Pengembalian akun belanja 512411 dengan NTPN C16325UFPQMKF7B8, NTB 233596110918 senilai 96.498 tanggal 4 November 2024

Belanja Barang Rp
14,322,467,219

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 14,322,467,219** dan **Rp 14,638,072,044**. Realisasi Belanja Barang 2024 mengalami **penurunan sebesar (2,15) %** dari Realisasi Belanja Barang TA

2023. Perubahan disebabkan sebagai berikut:

- a. Proporsi besaran pagu belanja Barang TA 2024 lebih rendah dibanding dengan pagu belanja barang TA 2023. Pagu TA 2024 sebesar 14,524,248,000 (semula sebesar 9,113,329,000 yang bertambah per Agustus 2024 dari program LAUTRA PLN) dan tahun 2023 sebesar 15.284.512.000 (turun sebesar prosentase 8,53%).
- b. Realisasi belanja barang terdapat beberapa perubahan signifikan pada berbagai jenis belanja. Berikut rincian perubahan yang terjadi:
 - 1) Belanja Barang Operasional mengalami penurunan sebesar 36,04%, dari Rp2.334.877.987 menjadi Rp1.493.297.126. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pengeluaran operasional atau pengurangan kebutuhan operasional pada tahun ini.
 - 2) Belanja Barang Non Operasional juga mencatat penurunan yang cukup besar, yakni 38,42%, dari Rp2.290.647.126 menjadi Rp1.410.662.339. Penurunan ini dapat mencerminkan penyesuaian pada alokasi anggaran untuk kebutuhan non-operasional.
 - 3) Belanja Barang Persediaan turun sebesar 10,98%, dari Rp162.137.978 menjadi Rp144.333.135. Penurunan ini relatif lebih kecil dibandingkan pos lainnya, yang mungkin menunjukkan stabilitas dalam kebutuhan persediaan.
 - 4) Belanja Jasa meningkat signifikan sebesar 25,79%, dari Rp3.465.271.594 menjadi Rp4.359.049.430. Peningkatan ini berupa pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan jasa dari pihak lainnya dalam implementasi program konservasi, seperti pengadaan jasa teknis, konsultan ahli, atau pendukung pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat.
 - 5) Belanja Pemeliharaan mengalami penurunan drastis sebesar 53,15%, dari Rp1.533.989.758 menjadi Rp718.651.359. Terjadi dikarenakan efisiensi atau pengurangan aktivitas pemeliharaan.

- 6) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri mengalami kenaikan sebesar 29,89%, dari Rp4.610.683.692 menjadi Rp5.988.664.948. Peningkatan ini menunjukkan intensitas koordinasi, monitoring, dan evaluasi di berbagai wilayah konservasi yang tersebar di wilayah kerja BKKPN Kupang.
- 7) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri mencatat penurunan yang sangat besar, yaitu 69,02%, dari Rp55.712.855 menjadi Rp17.261.440. Penurunan ini dikarenakan pembatasan khusus terhadap aktivitas perjalanan luar negeri dengan tujuan efisiensi dalam pengelolaan anggaran perjalanan luar negeri.
- 8) Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat mengalami sedikit kenaikan sebesar 8,23%, dari Rp184.751.054 menjadi Rp199.954.623. Hal ini disebabkan adanya peningkatan alokasi belanja yang ditujukan langsung untuk masyarakat.

Perbandingan Belanja Barang
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Barang Operasional	1.493.297.126	2.334.877.987	(36,04)
Belanja Barang Non Operasional	1.410.662.339	2.290.647.126	(38,42)
Belanja Barang Persediaan	144.333.135	162.137.978	(10,98)
Belanja Jasa	4.359.049.430	3.465.271.594	25,79
Belanja Pemeliharaan	718.651.359	1.533.989.758	(53,15)
Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri	5.988.664.948	4.610.683.692	29,89
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	17.261.440	55.712.855	(69,02)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	199.954.623	184.751.054	8,23
Jumlah Belanja Kotor	14.331.874.400	14.638.072.044	(2,09)
Pengembalian Belanja	(9.407.181)	(1.324.100)	610,46
Jumlah Belanja	14.322.467.219	14.636.747.944	(2,15)

Terdapat pengembalian belanja barang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengembalian Belanja Bahan – 521211 dengan nomor NTPN D06A65UFPPV309P3, NTB 512580097417 tanggal 25 Oktober 2024 senilai 1.515.000 yang berasal dari pengembalian belanja konsumsi atas pemantauan

inspektorat Jenderal bulan Oktober 2024.

- 2) Pengembalian belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan – 523111 dengan nomor NTPN 1A2315229VC3GO3I, NTB 241025137529 tanggal 25 Oktober 2024 senilai 7.892.181 yang berasal dari lebih bayar atas pekerjaan pemeliharaan Gedung dan bangunan kantor BKKPN Kupang tahun 2024 atas temuan hasil pemantauan Inspektorat Jenderal.

Atas pengembalian belanja tersebut dilakukan pemulihan pagu yang menyebabkan sisa anggaran bertambah. Pagu awal senilai Rp.208,810,000 dilakukan revisi menjadi Rp.196,229,000. Pada tanggal 2 September 2024 terdapat Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor BKKPN Kupang dengan SPK.335/BKKPN.PPK/PL.430/IX/2024 senilai Rp.194,014,000 yang menyebabkan sisa anggaran menjadi senilai Rp.2.215.000.

Atas pemantauan itjen bulan Oktober 2024, terdapat lebih bayar pada pekerjaan pemeliharaan Gedung tersebut senilai Rp.7.892.181. Atas lebih bayar tersebut dilakukan pengembalian belanja senilai Rp.7.892.181.

Pengembalian belanja senilai Rp.7.892.181 dilakukan pemulihan pagu yang berakibat mengurangi nilai realisasi atas pekerjaan tersebut dari semula senilai Rp.194,014,000 menjadi Rp.186.121.819 sehingga sisa anggaran yang semula senilai Rp.2.215.000 bertambah menjadi senilai Rp.10.107.181. Atas ketersediaan pagu akun pemeliharaan Gedung dan bangunan senilai Rp.10.107.181 tersebut, pada tanggal 29 Desember 2024 direalisasikan Belanja Pekerjaan Pemeliharaan Halaman Kantor pada Kantor BKKPN Kupang senilai Rp.10,008,315 sehingga nilai Realisasi akhir atas akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan senilai Rp.103,822.

Hal tersebut menyebabkan nilai realisasi belanja bruto Pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan 31 Desember 2024 di akun 523111 - Belanja Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan melebihi dari nilai pagu, yakni senilai 204,022,315 atas pagu senilai 196,229,000 dengan prosentase realisasi 103,97%. Nilai realisasi lebih 100% tersebut dikarenakan pengakuan belanja bruto berdasarkan nilai kontrak dan nilai kwitansi.

Belanja Modal Rp
651,880,000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 651,880,000** dan **Rp 3,009,674,160**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami penurunan sebesar **(78,34)** persen dibandingkan TA 2023. Nilai penurunan dikarenakan pagu untuk alokasi belanja modal TA 2023 lebih rendah dibanding pagu belanja modal TA 2023, yakni senilai Rp. 651,880,000 dan Rp. 3,012,100,000.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	501.880.000	3.009.674.160	(83,32)
Belanja Gedung dan Bangunan	150.000.000	0	100,00
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	651.880.000	3.009.674.160	(78,34)
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	651.880.000	3.009.674.160	(78,34)

Rincian belanja modal pada BKKPN Kupang sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan BAST.395/BKKPN.PPK/PL.450/X/2024, nomor kontrak SP.387/BKKPN.PPK/PL.430/X/2024 berupa pembelian Laptop

senilai 280,390,000 (nomor SP2D 241401304000246 tanggal 23 Oktober 2024);

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan BAST.466/BKKPN.PPK/PL.450/XI/2024, nomor kontrak SP.456/BKKPN.PPK/PL.430/XI/2024 berupa Printer (Peralatan Personal Komputer), Laptop, Tablet PC senilai 221.490.000 (nomor SP2D 241401304000322 tanggal 29 November 2024);
3. Belanja Modal Gedung dan bangunan berupa Penyediaan Prasarana Tower Air Bersih dengan nomor SP2D 240391701004524 tanggal 24 Desember 2024 senilai 150.000.000.

Belanja Modal
Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi tersebut pada 2024 tidak mengalami **kenaikan/penurunan sebesar 0,00** persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal tanah selama TA 2024 dan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp.
501,880,000

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar **501,880,000**. Mengalami penurunan sebesar **(83,52)** persen bila dibandingkan dengan TA 2023 sebesar **Rp 3,009,674,160**. Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin pada TA 2024 mengalami penurunan dibandingkan pada TA 2023 sebesar **(83,52)** persen dikarenakan Anggaran besar pada TA 2023 digunakan untuk memenuhi kebutuhan

strategis pengadaan peralatan dan mesin yang bersifat prioritas dan mendukung operasional utama. Setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, anggaran pada TA 2024 difokuskan pada pemeliharaan dan pengadaan terbatas.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	501.880.000	3.009.674.160	(83,32)
Jumlah Belanja Kotor	501.880.000	3.009.674.160	(83,32)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	501.880.000	3.009.674.160	(83,32)

Rincian belanja modal pada BKKPN Kupang sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan BAST.395/BKKPN.PPK/PL.450/X/2024, nomor kontrak SP.387/BKKPN.PPK/PL.430/X/2024 berupa pembelian Laptop senilai 280,390,000 (nomor SP2D 241401304000246 tanggal 23 Oktober 2024);
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan BAST.466/BKKPN.PPK/PL.450/XI/2024, nomor kontrak SP.456/BKKPN.PPK/PL.430/XI/2024 berupa Printer (Peralatan Personal Komputer), Laptop, Tablet PC senilai 221.490.000 (nomor SP2D 241401304000322 tanggal 29 November 2024);

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp
150.000.000*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 150.000.000** dan **Rp 0**. Mengalami kenaikan 100%, penyediaan prasarana Tower air bersih ini merupakan kebutuhan yang paling mendesak dan berdampak langsung dikarenakan fungsi atas bangunan tersebut. Belanja Modal Gedung dan bangunan berupa Penyediaan Prasarana Tower Air Bersih dengan nomor SP2D 240391701004524 tanggal 24 Desember 2024 senilai 150.000.000.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	%
Penyediaan Prasarana Tower Air Bersih	150.000.000	0	100,00
Jumlah Belanja Kotor	150.000.000	0	100,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	150.000.000	0	(100,00)

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan selama TA 2024 dan TA 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	%
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	-	-	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0*

B. 6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 **tidak mengalami penurunan/kenaikan sebesar 00,00 %** persen dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja Bantuan Sosial selama TA 2024 dan 2023.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp8,033,900

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp 8,033,900** dan **Rp 803,780**. Aset Lancar merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tertanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp 0

C. 1. 1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara pertanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp 0** dan **Rp 0** dengan rincian sebagai berikut : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2024 dan 2023*

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	0	0
Bank BNI - BPG 039 BKKPN KUPANG 9891344993521000	0	0
Uang Muka ke Staf Pengelola Anggaran	0	
Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	0	0
Jumlah	0	0

Rekening Bendahara Pengeluaran merupakan Rekening Virtual Pengeluaran dengan persetujuan dari KPPN Kupang Nomor S-2769/WPB.12/KP.03/2020/039 tanggal 21 Oktober 2020 dengan nomor rekening virtual 9891344993521000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sisa uang persediaan (UP) sebesar

Rp.0.

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0

C. 1. 3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu Investasi Jangka Pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya di bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan
Pajak Rp 580,000

C. 1. 4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp 580,000** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang PNB	0	0
Piutang Lainnya	580,000	0
Jumlah	580,000	0

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) Rp0

C. 1. 5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Bagian Lancar Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Nama	Tahun 2024	Tahun 2023
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan (TPA) yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-
Piutang Jk. Pendek
Rp(2,900)

C.1.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp(2,900)** dan **Rp0** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang, masing-

masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Pendek
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak tertagih	-	0%	-

Beban Dibayar Dimuka
Rp.0

C.1.8 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing -masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar Dimuka Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Dibayar Dimuka TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp.0

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah	0	0

C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan Hak Pemerintah atas layanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**, dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan	0	0
Pendapatan	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan Rp.
1,223,000

C.1.10 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp 7,456,800** dan **Rp 803,780**.

Rincian Persedian TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Barang Konsumsi	7.456.800	803.780
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	7.456.800	803.780

Semua Jenis Persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Barang konsumsi senilai total Rp.7,456,800 berupa:

1. Alat tulis senilai Rp. 3,448,300
2. Alat tulis Kantor Lainnya Rp. 1,589,500
3. Bahan Komputer lainnya Rp. 1,309,000
4. Meterai Rp. 1,110,000

Aset Tetap Rp
31,733,765,429

C. 2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp 31,733,765,429** dan **Rp 33,765,559,799**. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp.17,456,684,891

C. 2. 1 Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp 17,456,684,891** dan **Rp 17.419.986.688** .

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	17.419.986.688
Mutasi tambah :	
Reklas Masuk	36.698.203
Mutasi Kurang :	
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2024	17.456.684.891
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	17.456.684.891

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	30.192 M2'	Jl Yos Sudarso Bolok-Kec. Alak Kupang, Nusa Tenggara Timur - Kantor Utama BKKPN Kupang	16.907.520.000
2	720 M2	Jl. Ampenan Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat - Kantor TWP Gili Matra	512.466.688
3	750 M2	Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur	36.698.203
Jumlah			17.456.684.891

Detail Rincian Tanah:

1. Tanah seluas 30.192 m2 yang terletak di Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari dan sertifikat Hak Pakai atas Nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
2. Tanah bertempat di Jl. Bangsal Baru, Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat dengan luas tanah 720 M2 yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2022. Aset tanah untuk saat ini digunakan sebagai Kantor BKKPN Kupang wilayah kerja Taman Wisata Perairan Gili Matra.
3. Tanah bertempat di Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur

yang merupakan tanah hibah dari pemerintah Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao nomor 000.2.3.2/1249/BKA.2023 tanggal 28 November 2023 yang telah disahkan melalui Surat pengesahan Hibah Langsung (SPHL) pada bulan Maret 2024.

Peralatan dan
Mesin Rp.
24,869,581,739

C. 2. 2 Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2024 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp 24,869,581,739** dan **Rp24,367,701,739**. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	24.367.701.739
Mutasi tambah :	
Pembelian	501.880.000
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-
Mutasi Kurang:	
Usulan penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2024	24.869.581.739
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	- 17.819.754.676
Nilai Buku per 31 Desember 2024	7.049.827.063

Penambahan peralatan dan mesin sebagai berikut:

1. Pengadaan Sarana Pengolah Data Konservasi berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan BAST.395/BKKPN.PPK/PL.450/X/2024, nomor kontrak SP.387/BKKPN.PPK/PL.430/X/2024 berupa pembelian 11 unit Laptop senilai 280,390,000 (nomor SP2D 241401304000246 tanggal 23 Oktober 2024);
2. Pengadaan Alat Pengolah Data GIS berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan BAST.466/BKKPN.PPK/PL.450/XI/2024, nomor kontrak SP.456/BKKPN.PPK/PL.430/XI/2024 berupa 5 unit Printer

(Peralatan Personal Komputer), 4 unit Laptop, 2 unit Tablet PC senilai 221.490.000 (nomor SP2D 241401304000322 tanggal 29 November 2024);

*Gedung dan
Bangunan Rp.
7,812,704,911*

C. 2. 3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp 7,812,704,911** dan **Rp 7,662,704,911**. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	7.662.704.911
Mutasi tambah :	
Pengembangan Melalui KDP	150.000.000
Mutasi Kurang:	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2024	7.812.704.911
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	- 1.080.406.110
Nilai Buku per 31 Desember 2024	6.732.298.801

Rincian Mutasi tambah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 berupa Belanja Modal Gedung dan bangunan berupa Penyediaan Prasarana Tower Air Bersih dengan nomor SP2D 240391701004524 tanggal 24 Desember 2024 senilai 150.000.000.

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp.1,467,765,500*

C. 2. 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp 1.467.765.500** dan **Rp 1.467.765.500**.

Rincian Mutasi Jalan, irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1.467.765.500
Mutasi tambah :	
-	-
Mutasi Kurang	-
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 31 Desember 2024	1.467.765.500
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	- 973.810.826
Nilai Buku per 31 Desember 2024	493.954.674

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
RP.1.000.000

C. 2. 5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp 1.000.000** dan **Rp 1.000.000** dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1.000.000
Mutasi tambah :	
-	-
Mutasi Kurang	-
-	
Saldo per 31 Desember 2024	1.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1.000.000

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp.0

C. 2. 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Rp.
(18,565,148,549)

C. 2. 7 Akumulasi Penyusutan Aset

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing – masing adalah sebesar **Rp (18,565,148,549)** dan **Rp (17,153,599,039)**.

Akumulasi Penyusutan Aset merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain bentuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset per 31 Desember 2024 :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	17.456.684.891	-	17.456.684.891
2	Peralatan dan Mesin	24.869.581.739	(17.819.754.676)	7.049.827.063
3	Gedung dan Bangunan	7.812.704.911	(1.080.406.110)	6.732.298.801
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.467.765.500	(973.810.826)	493.954.674
5	Aset Tetap Lainnya	1.000.000	-	1.000.000
Akumulasi Penyusutan		51.607.737.041	(19.873.971.612)	31.733.765.429

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Piutang Jangka
Panjang Rp.0

C. 3 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan /
Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)

C. 3. 1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Balai Kawasan Konservasi Perairan

Rp.0

Nasional Kupang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp.0

C. 3. 2 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian TPA untuk masing -masing debitur adalah sebagi berikut :

Rincian Piutang TPA TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp.0

C. 3. 3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas

ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh
kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan
Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah
sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.

Panjang TA 2024

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Tagihan TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	0%	-

Aset Lainnya Rp
1,027,929,844

C.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp 1,027,929,844** dan **Rp 1,167,039,386**.

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar ataupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor BKKPN Kupang sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri dari Aset Tak Berwujud dengan nilai buku Rp.0 dan Aset Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dengan nilai buku

Rp. 1,078,459,876.

Aset Tak Berwujud

Rp 0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp 0** dan **Rp 0**.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi kurang :	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Amortisasi s.d 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	-	-
2	-	-
	Jumlah	-

Aset Lain - lain

Rp 12,914,359,552

C.4.2. Aset Lain -lain

Aset Lain - lain per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp12,914,359,552** dan **Rp12,914,359,552**. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	12.914.359.552
Mutasi tambah :	-
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Peralatan dan Mesin	-
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset tak Berwujud (Software)	-
Mutasi kurang :	1.827.944.835
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	1.827.944.835
Saldo per 31 Desember 2024	11.086.414.717
Amortisasi s.d 31 Desember 2024	- 10.058.484.873
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1.027.929.844

Rincian Aset Lain – lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(10,058,484,873)

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp (10,058,484,873)** dan **Rp (11,747,320,166)**.

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya TA 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud	-	-	-
	Jumlah		-	-
B	Aset Lain-lain	11.086.414.717	10.058.484.873	1.027.929.844
	Jumlah	-	-	-
	Total	11.086.414.717	10.058.484.873	1.027.929.844

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka
Pendek Rp.
27,278,318

C. 5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang

pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atas jatuh tempk dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp 27,278,318** dan **Rp 24,910,442**.

Uang Muka dari
KPPN Rp 0

C. 5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp 0** dan **Rp0**, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga Rp
27,278,318

C. 5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp 27,278,318** dan **Rp 24,910,442**, Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	27.278.318
2		
3	-	-
	Total	27.278.318

1. Nilai tersebut muncul atas transaksi Utang kepada Pihak Ketiga berupa tagihan langganan Listrik, Internet, Telepon dan Air bulan Desember 2024 yang jatuh tempo

pembayarannya pada bulan Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut:

2. Belanja Langganan Listrik Bulan Desember 2024 yang belum dibayar tagihannya senilai 12.240.782;
3. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya (Internet) Desember 2024 yang belum dibayar tagihannya senilai Rp13.913.775;
4. Belanja Langganan telepon bulan Desember 2024 yang belum dibayar tagihannya senilai Rp841.716;
5. Belanja Langganan air bulan Desember 2024 yang belum dibayar tagihannya senilai Rp. 282.045.

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0*

C. 5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang / jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
Jumlah	

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

*Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp0*

C. 5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Utang yang belum
ditagihkan Rp. 0

C. 5.5. Utang yang belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp 0** dan **Rp0**.

Ekuitas
Rp.
32,742,450,855

C. 7. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp 32,742,450,855** dan **Rp 34,908,492,523**. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp 4,114,560,000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp 4,114,560,000** dan **Rp 2,369,683,750**. Pendapatan tersebut terdiri:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	4.114.560.000	2.369.683.750	73,63
Pendapatan Lain - lain	0	0	-
Jumlah	4.114.560.000	2.369.683.750	73,63

Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya berupa pungutan Karcis Masuk Pariwisata Alam Kawasan Konservasi Perairan (Domestik & Mancanegara) beserta Sarana yang dibawa dan Tanda Masuk Penelitian di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang rentang periode 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024. Penerimaan didominasi dari Karcis Masuk Pariwisata Alam Perairan (PAP) senilai 4,114,560,000 atau sebesar 99,74% dari keseluruhan pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya.

Pada Tahun 2024 penerimaan pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan lainnya naik sebesar 73,63% dibanding tahun 2023. Kenaikan pendapatan disebabkan antara lain:

- Berakhirnya masa pandemic Covid-19 dan beralih ke masa Endemi, sehingga wisatawan bisa dengan mudah melakukan kunjungan ke Indonesia/ Daerah lain. Hal tersebut berdampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Taman Wisata Perairan seperti di Gili Trawangan, Matra, Aer dan di Kawasan KKPN Lain seperti Laut Banda dan Raja Ampat (Wayag, Waigeo). Hal tersebut berdampak pada peningkatan karcis masuk PAP dari Mancanegara yang menyumbang senilai 3.748.600.000 atau sebesar 91,11% dari total PNBP Pendapatan Jasa kelautan dan perikanan lainnya.

- b. Penerapan tarif penuh sesuai dengan PP 85 tahun 2021 pasca pandemi per tanggal 21 Desember 2023.
- c. Komitmen organisasi untuk meningkatkan pendapatan dengan menambah Gerai Pelayanan serta penambahan SDM Tenaga Pelayanan yang ditempatkan pada Pos-pos pintu masuk Kawasan Konservasi Perairan Nasional seperti di TWP Gili Matra, TNP Laut Sawu dan SAP Raja Ampat dan Waigeo Sebelah Barat.

Rekapitulasi Capaian Pendapatan Jasa Lainnya sebagai berikut:

No.	Kawasan	Jenis Pungutan					Nominal
		Karcis Masuk PAP			TM Pendidikan	TM Penelitian	
		Domestik	Mancanegara	Sarana yang Dibawa			
1	TNP Laut Sawu	160.000	13.100.000	13.875.000		5.100.000	32.235.000
2	TWP Gili Matra	8.850.000	3.416.400.000	4.150.000			3.429.400.000
3	TWP Kapoposang	2.280.000	1.800.000	2.485.000		5.700.000	12.265.000
4	TWP Laut Banda	920.000	4.200.000	10.830.000			15.950.000
5	TWP Kep. Padaido	390.000	1.700.000	710.000			2.800.000
6	SAP Raja Ampat	50.000	9.400.000	21.060.000		100.000	30.610.000
7	SAP Waigeo	2.240.000	302.000.000	287.060.000			591.300.000
8	SAP Aru Tenggara						-
TOTAL		14.890.000	3.748.600.000	340.170.000	-	10.900.000	4.114.560.000
		Rp4.103.660.000					
Prosentase Besaran PNB Per Jenis Pungutan		99,74%					
		0,36%	91,11%	8,27%	0,00%	0,26%	

Beban Pegawai D.2 Beban Pegawai

Rp

7,810,022,118

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 7,810,022,118** dan **Rp 7,083,561,725**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai 2024 naik sebesar 10,26 % dibanding dengan 2023, kenaikan tersebut berasal dari kenaikan prosentase besaran gaji pokok sebesar 8% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang aktif per 1 Januari 2024. Selain itu terdapat penambahan 2 PPPK Jabatan

PELP Ahli Pertama dan APJK Ahli Pertama yang aktif pada tanggal 1 Februari 2024.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	%
Beban Gaji	2.909.243.630	2.782.180.745	4,57
Beban Tunjangan - Tunjangan	4.357.522.488	3.924.754.980	11,03
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0,00
Beban Lembur	543.256.000	376.626.000	44,24
Jumlah Beban	7.810.022.118	7.083.561.725	10,26

*Beban
Persediaan Rp
137,680,115*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 137,680,115** dan **Rp 165,442,698**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban persediaan 2024 mengalami penurunan dibanding dengan 2023 sebesar 16,78% yang disebabkan diantaranya perubahan proporsi besaran anggaran serta efisiensi penggunaan belanja persediaan konsumsi.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	137.680.115	165.442.698	(16,78)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Beban	137.680.115	165.442.698	(16,78)

*Beban Barang dan
Jasa Rp
7,263,861,771*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 7,263,861,771** dan **Rp**

8,128,841,790. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Penurunan Beban Barang dan Jasa senilai 10,64% terjadi karena adanya penghematan atas beban – beban operasional perkantoran, penurunan beban keperluan perkantoran disebabkan adanya penghematan terkait belanja operasional kantor, penurunan beban barang terkait penanganan Covid 19 dikarenakan masa pandemic sudah berakhir, penurunan beban honor output kegiatan disebabkan pos anggaran honor pokja pengadaan lelang yang lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya dikarenakan pagu blokir untuk beberapa pengadaan belanja modal, penurunan beban telepon disebabkan penggunaan telepon yang sudah jarang digunakan oleh kantor beralih ke ponsel selular, serta penurunan pada beban jasa lainnya yang disebabkan berkurangnya kegiatan BKKPN yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa kegiatan/ *Event Organizer* di tahun 2023 dibanding sebelumnya.

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.385.402.252	2.148.721.387	(35,52)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21.278.874	30.383.600	(29,97)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	86.616.000	153.838.000	(43,70)
Beban Bahan	1.387.832.539	2.240.944.926	(38,07)
Beban Honor Output Kegiatan	8.160.000	8.160.000	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	18.700.000	(100,00)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	8.442.300	(100,00)
Beban Langganan Listrik	187.061.386	182.576.547	2,46
Beban Langganan Telepon	14.287.905	7.371.479	93,83
Beban Langganan Air	7.594.416	7.683.987	(1,17)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	188.730.399	226.340.700	(16,62)
Belanja Jasa Konsultan	79.694.400	149.933.250	(46,85)
Beban Sewa	2.297.400.000	2.031.465.000	13,09
Beban Jasa Profesi	124.096.000	49.700.000	149,69
Beban Jasa Lainnya	1.462.552.800	810.252.634	80,51
Beban Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	13.154.800	54.327.980	(75,79)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Jumlah Beban	7.263.861.771	8.128.841.790	(10,64)

Beban
Pemeliharaan Rp
710,759,178

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 710,759,178** dan **Rp 1,533,989,758**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban Pemeliharaan sebesar 11,52% dibanding tahun 2023 dikarenakan adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset – aset lama. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	196.130.134	749.853.000	(73,84)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	514.629.044	784.136.758	(34,37)
Jumlah Beban	710.759.178	1.533.989.758	(53,67)

Beban Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2024 merupakan pembebanan atas belanja pemeliharaan peralatan dan mesin serta Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang meliputi:

1. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4, digunakan untuk pembebanan biaya servis rutin kendaraan roda 4, pembelian BBM operasional serta pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor.
2. Pemeliharaan Peralatan Survei, digunakan untuk pembiayaan pemeliharaan peralatan survey seperti perawatan peralatan selam, perawatan kompresor selam, serta tools lain seperti GPS, perbaikan *dive watch*.
3. Pemeliharaan peralatan CCTV kantor.
4. Pemeliharaan kendaraan roda 4 *double* gardan pada Kantor BKKPN meliputi servis rutin, BBM operasional, pembayaran KIR dan pajak tahunan kendaraan bermotor.
5. Pemeliharaan kendaraan roda 2, berupa servis rutin dan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor.
6. Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat Kantor
7. Pemeliharaan Speed Boat Kantor berupa servis rutin, docking dan pemeliharaan mesin dan bagian speed boat lainnya.
8. Pemeliharaan computer meliputi perbaikan dan servis computer, penggantian part yang rusak.
9. Pemeliharaan Laptop berupa pemeliharaan rutin laptop kantor
10. Pemeliharaan AC pada kantor BKKPN beserta wilker yang tersebar didalamnya.
11. Pemeliharaan printer berupa servis rutin printer yang terdapat di seluruh kantor BKKPN Kupang.
12. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada kantor BKKPN

Kupang.

Berikut detail atas rincian tersebut:

No.	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	141.518.000	141.517.083	100,00%	917
2	Pemeliharaan Peralatan Survei	15.734.000	15.733.800	100,00%	200
3	Pemeliharaan CCTV	2.825.000	2.824.470	99,98%	530
4	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Double Gardan	58.132.000	58.130.600	100,00%	1.400
5	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	62.908.000	62.906.986	100,00%	1.014
6	Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat TNP Laut Sawu	4.045.000	4.045.000	100,00%	-
7	Pemeliharaan Speed Boat	155.420.000	155.419.940	100,00%	60
8	Pemeliharaan Komputer	7.904.000	7.904.000	100,00%	-
9	Pemeliharaan Laptop	9.194.000	9.193.964	100,00%	36
10	Pemeliharaan AC	46.128.000	46.127.201	100,00%	799
11	Pemeliharaan Printer	10.826.000	10.826.000	100,00%	-
12	Pemeliharaan Gedung Kantor BKKPN Kupang	186.135.000	194.014.000	104,23%	(7.879.000)
13	Pemeliharaan Halaman Kantor BKKPN Kupang	10.094.000	10.008.315	99,15%	85.685
TOTAL		710.863.000	718.651.359	101,10%	4.956

**Beban
Perjalanan
Dinas
Rp
6,005,346,388**

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 6,005,346,388** dan **Rp 4,666,396,547**. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Secara keseluruhan terjadi kenaikan beban perjalanan dinas sebesar 28,71% dibanding tahun 2023.

Rincian Beban Perjalanan Dinas

TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Perjalanan Biasa	4,262,541,747	3,132,497,467	36.07
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,043,956,401	1,231,976,225	(15.26)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	681,586,800	246,210,000	176.83
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	17,261,440	55,712,855	(69.02)
Jumlah Beban	6,005,346,388	4,666,396,547	28.69

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp 199,954,623

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 199,954,623** dan **Rp 184,751,054**. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	199.954.623	184.751.054	8,23
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah Beban	199.954.623	184.751.054	8,23

Barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada 2024 senilai 199,954,623 berupa 3 bantuan pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Kompak untuk Kemitraan Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra sesuai BAST No. B.1135/BKKPN/PRL.440/VI/2024, tgl 20 Juni 2024. Barang telah diserahkan kepada Kelompok Rehabilitasi Karang Web Spider yang diketuai oleh Umar yang berada di Pulau Kapoposang, Desa Mattiro Ujung, Kecamatan Liukkang, Tuppabiring, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. Barang yang diserahkan berupa Tabung Selam dan Laptop senilai total **Rp.71.932.955**.
2. Belanja barang pekerjaan pengadaan bantuan kompak untuk Kemitraan Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu sesuai BAST

B.1197/BKKPN/PRL.440/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024. Barang telah diserahkan kepada kelompok Yayasan Beta Cinta Laut yang berada di Jalan Jambu Nomor 35, Kelurahan Naikoten, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang diketuai oleh Sevanter Lak'Apu. Barang yang diserahkan berupa Set Peralatan selam dan Kamera Bawah Air senilai total **Rp.88.023.000**.

3. Belanja barang pekerjaan pengadaan bantuan kompak untuk Kemitraan Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu sesuai BAST B.1769/BKKPN/PRL.440/IX/2024 tanggal 3 September 2024 yang diserahkan kepada kelompok Masyarakat Pengawas "Konservasi Bukan Sekedar Pasiar (BSP)" yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang diketuai oleh Radith Giantiano. Barang yang diserahkan berupa set kamera underwater senilai total **Rp.39.998.628**

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 2,859,482,115

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 2,859,482,115** dan

Rp 3,195,756,377. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.487.992.774	2.724.655.339	(8,69)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	174.867.285	173.049.163	1,05
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan Irigasi dan Jaringan	57.512.514	109.106.312	(47,29)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam operasi pemerintah	139.109.542	188.945.563	(26,38)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Beban	2.859.482.115	3.195.756.377	(10,52)

Beban Penyisihan D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang Tak

Tertagih Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 dan 2023 (dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
- Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
- Piutang Non Lancar	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

Kegiatan Non
Operasional Rp
18,653,817

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 18,653,817** dan **Rp 63,334,884**. Rinciannya adalah sebagai berikut;

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	15.212.190	62.034.884	(75,48)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.441.627	1.300.000	164,74
Jumlah Beban	18.653.817	63.334.884	(70,55)

- 1) Pendapatan pelepasan aset non lancar senilai 15.212.190 merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang dihapuskan melalui mekanisme lelang oleh KPKNL dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penjualan BMN berupa 1 Unit Sepeda Motor Honda NF 100 SE dengan kondisi rusak berat senilai Rp.4.625.000 dengan NTPN AF3023CIFKRVDBJ8 NTB 241204038098 tanggal 4 Desember 2024 Risalah Lelang nomor 426/14.05/2024-01 tanggal 4 Desember 2024
 - b. Penjualan 1 unit scrap/ limbah padat survey boat senilai 2.048.883 dengan NTPN 386F00NA055256O3 NTB 241213075334 tanggal 13 Desember 2024 dengan Risalah Lelang nomor 2106/15.02/2024-01 tanggal 11 Desember 2024
 - c. Penjualan 1 unit alat angkutan apung, Kapal TWP Padaido (speed boat) senilai 4.784.933 dengan NTPN 3B15C7QLUPO8D1FQ, NTB 241216017328, Risalah Lelang nomor 189/17.04/2024-01 tanggal 12 Desember 2024
 - d. Penjualan 1 unit sepeda motor NF 12A1CF M/T tahun 2012 senilai 3.100.000 dengan NTPN C5B0A6U8EV5UC78L, NTB 078229670497, Risalah Lelang 742/14.03/2024-01 tanggal 18 Desember 2024
 - e. Penjualan 1 paket inventaris kantor berupa peralatan dan mesin kondisi rusak berat senilai 653.374 dengan NTPN 1C4136U8EV2LHA4P, NTB 599157432800, Risalah Lelang nomor 218/17.01/2024-01 tanggal 8 November

2024.

- 2) Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya senilai 3,441,627 berasal dari dari Pengembalian Belanja Tahun Anggaran yang lalu. Transaksi berasal dari Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri tahun 2023 nomor kuitansi 03694/KW/499352/2023 dengan NTPN E842F6U8EV35DCUJ dan NTB 983057585280 senilai 3.441.627

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp 34,908,492,523

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp34,908,492,523** dan **Rp 35,135,924,543**

Defisit LO

Rp

(20,853,895,391)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah deficit sebesar **Rp(20,853,895,391)** dan **Rp (22,525,721,315)**. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/deficit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif

Perubahan

Kebijakan

Akuntansi

Rp0

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp0**.

Penyesuaian Nilai

Aset Rp0

E. 4. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E. 4. 2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian Nilai Persediaan untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Persediaan	Koreksi
1	Barang Konsumsi	-
2	Suku Cadang	-
	Jumlah	-

Selisih Revaluasi

E. 4. 3 Selisih Revaluasi Aset

Aset

Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**

Koreksi Aset Tetap

E. 4. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Non Revaluasi

Rp0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Koreksi Lain-Lain

E. 4. 5 Koreksi Lain-Lain

Rp0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar

E. 5 Transaksi Antar Entitas

Entitas

Rp 18,687,853,723

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp. 18,687,853,723** dan **Rp 22,298,289,295**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas TA 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(4.133.213.817)
Ditagihkan ke Entitas Lain	22.784.369.337
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	
Pengesahan Hibah Langsung	36.698.203
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	18.687.853.723

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E. 5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar **Rp(4,133,213,817)** sedangkan DKEL sebesar **Rp 22,784,369,337**.

E. 5. 2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 **Rp0**. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar **Rp0**.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar **Rp36.698.203**. Nilai pengesahan hibah langsung tersebut

berasal dari Pengesahan Penerimaan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam bentuk Barang pada tahun 2023 sesuai NPHD Nomor:000.2.3.2/1248/BKA/2023 dan B.3206/SJ.2/TU.210/XI/2023 tanggal 28 November 2023 berupa Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Ekuitas Akhir

Rp. 32,742,450,855

E. 6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing Adalah sebesar **Rp 32,742,450,855** dan **Rp 34,908,492,523,-**

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

F. 1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat Utang kepada Pihak Ketiga senilai 27,278,318 yang merupakan Belanja yang masih harus dibayar atas belanja tagihan langganan Listrik, Langganan Internet, Langganan Telepon dan Langganan Air periode Desember 2024 yang dibiarkan tagihannya pada Januari 2025.

F. 2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan KEP.40/MEN/KU.611/2020 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Keputusan Menteri KP Nomor B.1/BKKPN/KU.110/1/2023, dan B.2/BKKPN/I/2022 Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Imam Fauzi, S.S, M.Eng
Pejabat Pembuat Komitmen	: Imam Fauzi, S.S, M.Eng
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	: Muhammad Ramli Firman, S.T, M.T
Bendahara Pengeluaran	: Mohammad Akhid Yunanto, S.PWK

Bendahara Penerimaan : Amos Moi Ponggalo, S.Pi

Per tanggal 4 April 2023, berdasar Keputusan kepala Balai atas nama MKP Nomor B.1203/BKKPN/KU.110/III/2023 perihal Perubahan Pertama atas penetapan PPK dan PPSPM terdapat perubahan Pejabat Pengelola Keuangan TA 2024 dengan detail sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Imam Fauzi, S.S, M.Eng
Pejabat Pembuat Komitmen	: Muhammad Ramli Firman, S.T, M.T
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	: Ika Rakhmad Satria, SE
Bendahara Pengeluaran	: Mohammad Akhid Yunanto, S.PWK

Bendahara Penerimaan : Amos Moi Ponggalo, S.Pi

2. Alokasi Anggaran Belanja Kantor Balai Kawasan Konservasi perairan Nasional (BKKPN) Kupang tahun 2024 sebesar 23.005.128.000 yang terdiri dari 3 (tiga) sumber dana yakni:

- Rupiah Murni (RM) senilai 16.292.329.000
- PNBPA Berjalan 800.000.000
- Pinjaman Luar Negeri (PLN) 5.912.799.000

dengan nomor DIPA SP DIPA- 032.07.2.499352/2024 tanggal 24 November 2022.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terdapat alokasi Pagu Anggaran yang masih dilakukan Blokir (*Non Automatic Adjustment*) pada KRO 2367.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal – RO 2367.EBA.956 Layanan BMN senilai **Rp.39.740.000** serta blokir Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya (pembatasan akun perjalanan dinas - Kebijakan S-1023/MK.02/2024) sebesar **Rp.126.511.000**.

Pada bulan Agustus 2024 terdapat penambahan anggaran belanja yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri untuk kegiatan Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem - Oceans for Prosperity Project – Lautra dengan penambahan pagu sebesar 5,912,799,000 yang diperuntukan untuk belanja barang sebesar 5.410.919.000 dan belanja Modal 501.880.000 yang tercantum pada perubahan DIPA ke 7 tanggal 22 Agustus 2024.

Rentang periode sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat 12 kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut:

No.	Revisi ke	Tanggal Pengesahan	DIPA Awal	DIPA Perubahan	Alasan Revisi
1	01	25 Januari 2024	17.082.329.000	17.082.329.000	pencantuman blokir Automatic Adjustment dalam Catatan Halaman IVA DIPA Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut - BKKPN Kupang
2	02	19 Februari 2024	17.082.329.000	17.082.329.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
3	03	24 April 2024	17.082.329.000	17.082.329.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
4	04	31 Mei 2024	17.082.329.000	17.082.329.000	- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (Updating) - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
5	05	3 Juni 2024	17.082.329.000	17.082.329.000	- Penyamaan Data Revisi POK; - Update Halaman III DIPA; - Optimalisasi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Satker
6	06	12 Juli 2024	17.082.329.000	17.082.329.000	- Penyamaan Data Revisi POK; - Update Halaman III DIPA; - Optimalisasi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Satker
7	07	22 Agustus 2024	17.082.329.000	22.995.128.000	- Penambahan pagu yang bersumber dari PHLN - KRO (baru) Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem; - Update Halaman III DIPA;
8	08	11 Oktober 2024	22.995.128.000	22.995.128.000	- Penyamaan Data Revisi POK; - Update Halaman III DIPA.
9	09	14 November 2024	22.995.128.000	23.005.128.000	- Perubahan besaran pagu belanja Pegawai - Penambahan KRO (baru) belanja modal Gedung dan Bangunan Layanan Sarana dan Prasarana Internal
10	10	18 November 2024	23.005.128.000	23.005.128.000	- Pencantuman blokir Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya - Kebijakan S-1023/MK.02/2024
11	11	12 Desember 2024	23.005.128.000	23.005.128.000	- Pergeseran POK berupa Penyesuaian pagu minus pada belanja pegawai; - Update Halaman III DIPA.
12	12	27 Desember 2024	23.005.128.000	23.005.128.000	- Penyamaan Data Revisi POK; - Update Halaman III DIPA.

Detail perubahan anggaran BKKPN Kupang sebagai berikut:

MAK	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Sumber Dana
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	3.246.306.000	9.159.105.000	
2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	2.676.306.000	2.676.306.000	RM & PNBP
2362.PEE	Kemitraan	100.000.000	100.000.000	RM
2362.QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat	320.000.000	320.000.000	RM
2362.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	-	5.912.799.000	PLN
2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies	150.000.000	150.000.000	RM
2366	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	300.000.000	300.000.000	
2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	300.000.000	300.000.000	PNBP
2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen	13.536.023.000	13.546.023.000	
2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12.399.423.000	12.259.423.000	RM
2367.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	150.000.000	RM
2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	384.000.000	384.000.000	RM
2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	752.600.000	752.600.000	RM

3. Realisasi Anggaran belanja BKKPN Kupang pada TA 2024 senilai **22,784,369,337** dari PAGU Anggaran sebesar **23,005,128,000** atau senilai **99,09 %**.

Rincian Realisasi berdasarkan Jenis Belanja:

- Realisasi Belanja Pegawai 7,810,022,118 dari Pagu belanja Pegawai 7,829,000,000 atau sebesar 99,77%. Pagu dan Realisasi seluruhnya pada jenis ini bersumber dari Rupiah Murni.
- Realisasi Belanja Barang 14,322,467,219 dari Pagu Belanja Barang 14,524,248,000 atau sebesar 98,68%. Pagu dan Realisasi pada jenis belanja Barang terbagi menjadi 3 sumber dana dengan rincian:
 - 1) Rupiah Murni. Pagu : 8,313,329,000, realisasi : 8,131,946,821
 - 2) PNBP. Pagu : 800,000,000, Realisasi : 785,266,832
 - 3) PLN. Pagu : 5,410,919,000, Realisasi : 5,405,253,566
- Realisasi Belanja Modal 501,880,000 dari Pagu Belanja Modal 501,880,000 atau sebesar 100%. Pagu dan Realisasi atas belanja Modal bersumber dari PLN dan RM.

Berdasarkan sumber dana, realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Belanja			
		Anggaran	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4	5	5
RUIPAH MURNI		16.292.329.000	16.101.160.423	98,83%	191.168.577
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.596.306.000	2.548.958.563	98,2%	47.347.437
2362.PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.026.306.000	2.012.661.664	99,33%	13.644.336
2362.PEE.001	Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	100.000.000	99.590.516	99,59%	409.484
2362.QEH.001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	320.000.000	293.328.210	91,67%	26.671.790
2362.REB.001	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	150.000.000	143.378.173	95,59%	6.621.827
2366	Perencanaan Ruang Laut	150.000.000	147.372.267	98,25%	2.627.733
2366.PBT.009	Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	150.000.000	147.372.267	98,25%	2.627.733
2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	13.546.023.000	13.404.829.593	98,96%	141.193.407
2367.EBA.956	Layanan BMN	143.954.000	76.355.950	53,04%	67.598.050
2367.EBA.957	Layanan Hukum	315.000.000	310.484.962	98,57%	4.515.038
2367.EBA.962	Layanan Umum	142.316.000	139.974.795	98,35%	2.341.205
2367.EBA.994	Layanan Perkantoran	11.658.153.000	11.602.298.371	99,52%	55.854.629
2367.EBB.994	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	150.000.000	150.000.000	100,00%	-
2367.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	384.000.000	383.921.387	99,98%	78.613
2367.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	234.204.000	225.420.888	96,25%	8.783.112
2367.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	433.296.000	432.180.640	99,74%	1.115.360
2367.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	85.100.000	84.192.600	98,93%	907.400
PNBP		800.000.000	786.781.832	98,35%	13.218.168
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	650.000.000	643.390.173	99,0%	6.609.827
2362.PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	650.000.000	643.390.173	98,98%	6.609.827
2366	Perencanaan Ruang Laut	150.000.000	143.391.659		6.608.341
2366.PBT.009	Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	150.000.000	143.391.659	95,59%	6.608.341
PLN		5.912.799.000	5.907.133.566	99,90%	5.665.434
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	5.912.799.000	5.907.133.566	99,9%	5.665.434
2362.REA.004	Oceans for Prosperity Project - Lautra	5.912.799.000	5.907.133.566	99,90%	5.665.434
	TOTAL	23.005.128.000	22.795.075.821	99,09%	210.052.179

4. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak BKKPN Kupang pada TA 2024 sebesar 4,133,213,817 dari pagu/ target Penerimaan TA 2024 senilai 1,354,900,000 atau sebesar 305,06%.

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada BKKPN Kupang terdiri dari beberapa pos sumber penerimaan, dengan detail sebagai berikut:

No.	Kode Akun	Uraian	Target Penerimaan	Nominal	% Realisasi Pendapatan
1	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	15.212.190	0,00
2	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	1.354.900.000	4.114.560.000	303,68
3	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	3.441.627	0,00
TOTAL			1.354.900.000	4.133.213.817	305,06%

Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya berasal dari Karcis Masuk Pariwisata Alam Kawasan Konservasi Perairan (Domestik & Mancanegara) beserta Sarana yang dibawa, Tanda Masuk Pendidikan dan Tanda Masuk Penelitian di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang rentang periode

1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 dengan detail sebagai berikut:

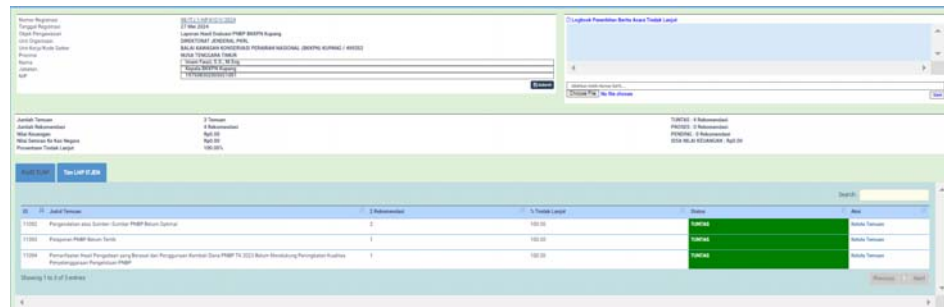
No.	Kawasan	Jenis Pungutan					Nominal
		Karcis Masuk PAP			TM Pendidikan	TM Penelitian	
		Domestik	Mancanegara	Sarana yang Dibawa			
1	TNP Laut Sawu	160.000	13.100.000	13.875.000		5.100.000	32.235.000
2	TWP Gili Matra	8.850.000	3.416.400.000	4.150.000			3.429.400.000
3	TWP Kapoposang	2.280.000	1.800.000	2.485.000		5.700.000	12.265.000
4	TWP Laut Banda	920.000	4.200.000	10.830.000			15.950.000
5	TWP Kep. Padaido	390.000	1.700.000	710.000			2.800.000
6	SAP Raja Ampat	50.000	9.400.000	21.060.000		100.000	30.610.000
7	SAP Waigeo	2.240.000	302.000.000	287.060.000			591.300.000
8	SAP Aru Tenggara						-
TOTAL		14.890.000	3.748.600.000	340.170.000	-	10.900.000	4.114.560.000
		Rp4.103.660.000					
Prosentase Besaran PNPB Per Jenis Pungutan		99,74%			0,00%	0,26%	
		0,36%	91,11%	8,27%			

Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya berupa pungutan Karcis Masuk Pariwisata Alam Kawasan Konservasi Perairan (Domestik & Mancanegara) beserta Sarana yang dibawa dan Tanda Masuk Penelitian di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang rentang periode 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024. Penerimaan didominasi dari Karcis Masuk Pariwisata Alam Perairan (PAP) senilai 4,114,560,000 atau sebesar 99,74% dari keseluruhan pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya.

5. Pada tahun 2024 tidak terdapat anggaran belanja barang terkait penanggulangan covid19 pada BKKPN Kupang.
6. Dalam pengelolaan uang persediaan, BKKPN Kupang menggunakan Rekening Virtual dengan nomor rekening 9891344993521000 BPG 039 BKKPN KUPANG sebagai rekening pengelolaan Uang Persediaan. Surat Persetujuan Penggunaan rekening dari KPPN Kupang Nomor S-2769/WPB.12/KP.03/2020/039 tanggal 21 Oktober 2020 atas penggunaan rekening virtual untuk menampung Uang Persediaan.
7. Sampai dengan 31 Desember 2024, BKKPN Kupang telah menyelesaikan seluruhnya kewajiban pertanggungjawaban atas temuan BPK RI dan Itjen KKP dan tidak terdapat temuan yang mengakibatkan kerugian negara/ setoran ke kas negara.

Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 - 2024 terhadap Satker Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang pada 13 s.d. 18 Mei 2024. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Nomor NOMOR 98/ITJ.1/HP.410/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, terdapat 3

temuan yang telah dituntaskan secara keseluruhan.



No	Jenis Aset	2. Revisi	3. Nilai	4. Status	5. Keterangan
10001	Pengembangan Sistem Informasi BKKPN Kupang	2	11,086,414,717	1	Ases
10002	Pengembangan Sistem Informasi BKKPN Kupang	2	11,086,414,717	1	Ases
10003	Pengembangan Sistem Informasi BKKPN Kupang	2	11,086,414,717	1	Ases
10004	Pengembangan Sistem Informasi BKKPN Kupang	2	11,086,414,717	1	Ases
10005	Pengembangan Sistem Informasi BKKPN Kupang	2	11,086,414,717	1	Ases

8. Per 31 Desember 2024 terdapat Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp. 11,086,414. Nilai tersebut tercatat di neraca sebagai aset lain-lain sebesar 11,086,414,717. Suatu aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dikarenakan kondisinya yang rusak berat, hilang, atau sebab lain yang mengakibatkan aset tetap tersebut tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintah. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan selanjutnya dapat dilakukan proses penghapusan, digunakan kembali, atau dilakukan perubahan kondisi. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan tidak dapat dilakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan.

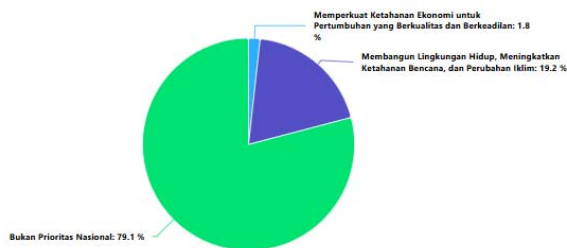
Selama tahun anggaran 2024, BKKPN Kupang telah melakukan inventarisir dalam rangka pengajuan usulan penghapusan atas barang yang dikategorikan sebagai henti guna pada aset BKKPN Kupang yang terdapat pada Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Wilayah Kerja TWP Kapoposang) dan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya (Wilayah kerja SAP Raja Ampat dan Waigeo).

9. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada satker BKKPN Kupang, Ditjen PKRL - Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu:

- 1) Prioritas Nasional (PN) VI – Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- 2) Prioritas Nasional (PN) I - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Prioritas Nasional Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (bkkpn) Kupang

Proporsi Pagu Anggaran



Prioritas Nasional

No.	Prioritas Nasional	Pagu	TVRO	RVRO	%
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	300.000.000	1	1	100
2	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	3.246.306.000	5	8	160
3	Bukan Prioritas Nasional	13.396.023.000	71	72	101

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi program prioritas Nasional sebagai berikut:

Nama Satker	Program/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategi	Target	Capaian Output Strategis	%
Prioritas Nasional VI - Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim								
BKKPN Kupang	Program Kualitas Lingkungan Hidup - Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati	3.246.306.000	3.192.348.736	98,34%				
-	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.676.306.000	2.656.051.837	99,24%	Rekomendasi Kebijakan	1	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
-	Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	100.000.000	99.590.516	99,59%	Kesepakatan	1	3 Kesepakatan	100%
-	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	320.000.000	293.328.210	91,67%	Kelompok Masyarakat	2	3 Kelompok Masyarakat	100%
-	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	150.000.000	143.378.173	95,59%	Jenis	1	1 Jenis	100%
Prioritas Nasional I - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan								
BKKPN Kupang	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan - Perencanaan Ruang Laut	300.000.000	290.763.926	96,92%				
-	Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	300.000.000	290.763.926	96,92%	Rekomendasi Kebijakan	1	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
TOTAL		3.546.306.000	3.483.112.662	98,22%				

*Data Capaian Output strategis berdasarkan capaian output Satker BKKPN Kupang bulan Desember 2024 yang sudah terkonfirmasi di OMSPAN.

Di tahun 2024, satuan kerja BKKPN Kupang mengelola anggaran tematik Anggaran Responsif Gender (003) pada Klasifikasi Rincian Output (KRO) Bantuan Kelompok Masyarakat - Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi dengan nilai anggaran 320.000.000 dan target capaian 2 kelompok Masyarakat. Realisasi tahun 2023 terkait Anggaran Responsif Gender (003) sebagai berikut:

Nama Satker	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%	Keterkaitan dengan PN
BKKPN Kupang	320.000.000	293.328.210	91,67%	Kelompok Masyarakat	2	3	150%	Prioritas Nasional VI – Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

**Data Capaian Output strategis berdasarkan capaian output Satker BKKPN Kupang bulan Desember 2024 yang sudah terkonfirmasi di OMSPAN.*

10. BKKPN Kupang menyelenggarakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang mempunyai tujuan bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Pengendalian dilakukan dengan menetapkan 5 akun signifikan yang merupakan akun beresiko atau berpotensi tinggi salah saji dalam pelaporan keuangan sesuai dengan Surat BKKPN nomor B.697/BKKPN/KP.210/IV/2024 tanggal 25 April 2024 Perihal Usulan Penetapan Akun Signifikan PIPK BKKPN Tahun 2024, serta Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor: 875/DJPKRL.1/HP.420/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal Penyampaian Penetapan Akun Signifikan Entitas Pelaporan UAPPA-E1 Ditjen PKRL Tahun 2024.

KODE/NAMA AKUN SIGNIFIKAN 2024 sebagai berikut:

- 1) 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran
- 2) 425629 Pendapatan jasa kelautan dan perijinan lainnya
- 3) 117124 Persediaan Peralatan dan Mesin yang Diserahkan ke Masyarakat
- 4) 117111 Barang Konsumsi
- 5) 162151 Software

Simpulan atas penerapan PIPK pada 5 akun signifikan PIPK 2024 berupa Pengendalian Internal Efektif (PIE).

12. Pada tahun 2024 terdapat beberapa jurnal penyesuaian, dengan rincian sebagai berikut:

- Jurnal Balik atas Belanja yang masih harus dibayar tahun 2023 senilai total Rp. 24,910,442 yang terdiri dari:

- 1) Jurnal Balik Penyesuaian Belanja langganan Listrik bulan Desember 2023 yang masih harus dibayar di Bulan Januari 2024 pada tanggal 4 Januari 2024 senilai 12.555.800
- 2) Jurnal Balik Penyesuaian Belanja langganan Daya dan Jasa Lainnya (Internet) bulan Desember 2023 yang masih harus dibayar di Bulan Januari 2024 pada tanggal 5 Januari 2024 senilai 11.129.475
- 3) Jurnal Balik Penyesuaian atas Belanja Telepon Desember 2023 yang masih harus dibayar di Januari 2024 pada tanggal 5 Januari 2024 senilai 390.165
- 4) Jurnal Balik Penyesuaian atas Belanja langganan Air Desember 2023 yang masih harus dibayar di Januari 2024 pada tanggal 12 Januari 2024 senilai 835.002
- 5) Jurnal Penyesuaian Belanja langganan Listrik bulan Desember 2024 yang masih harus dibayar di Bulan Januari 2025 senilai 12.240.782
- 6) Jurnal Penyesuaian Belanja langganan Daya dan Jasa Lainnya (Internet) bulan Desember 2024 yang masih harus dibayar di Bulan Januari 2025 senilai Rp13.913.775
- 7) Jurnal Penyesuaian atas Belanja Telepon Desember 2024 yang masih harus dibayar di Januari 2025 senilai Rp841.716
- 8) Jurnal Penyesuaian atas Belanja langganan Air Desember 2024 yang masih harus dibayar di Januari 2025 senilai 282.045.

Pencatatan jurnal tersebut telah dilengkapi dengan memo penyesuaian yang dilampirkan pada Catatan atas Laporan Keuangan 2024.

13. Pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat perbedaan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belanja dengan beban yang terdapat di Laporan Operasional (LO) dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

No.	Keterangan	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
1	Persediaan Konsumsi	144.333.135	137.680.115	6.653.020	
		Rp 803.780	7.456.800		1. Saldo Awal 2024 803.780 (1 Januari 2024) 2. Saldo Akhir 31 Desember 2024 7.456.800
		145.136.915	145.136.915	-	
2	Belanja Barang Jasa	4.359.049.430	4.361.417.306	- 2.367.876	
		841.716	390.165	451.551	1. Jurnal Penyesuaian Langganan Telepon Desember 2024 841.716 2. Langganan Telepon Desember 2023 yang dibayar di Januari 2024 (Jurnal Balik) - 390.165
		282.045	835.002	- 552.957	1. Jurnal Penyesuaian Langganan Air Desember 2024 senilai 282.045 2. Langganan Air Desember 2023 yang dibayar di Januari 2024 (Jurnal Balik) senilai 835.002
		13.913.775	11.129.475	2.784.300	1. Jurnal Penyesuaian langganan internet bulan Desember 2024 senilai 13.913.775 2. Daya dan Jasa Lainnya (Internet) 2023 yang dibayar di Januari 2024 (Jurnal Balik) senilai 11.129.475
		12.240.782	12.555.800	- 315.018	1. Jurnal penyesuaian langganan listrik Desember 2024 senilai 12.240.782 2. Jurnal Balik Penyesuaian Belanja langganan Listrik bulan Desember 2023 yang masih harus dibayar di Bulan Januari 2024
		4.386.327.748	4.386.327.748	-	
3	Pendapatan Negara Bukan Pajak	4.133.213.817	4.114.560.000	18.653.817	
			15.212.190		Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (akun 425122)
			3.441.627		Pendapatan Lain-Lain - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (Kode Akun 425912)
		4.133.213.817	4.133.213.817	-	

Penjelasan perbedaan antara LRA vs LO sebagai berikut:

- 1) Nilai LRA Barang Persediaan lebih besar dibanding nilai LO Barang persediaan dengan nilai selisih 6.653.020. Perbedaan nilai merupakan selisih antara saldo awal tahun 2024 persediaan senilai 803.780 dan saldo akhir tahun persediaan senilai 7.456.800.
- 2) Nilai LRA Barang dan Jasa lebih kecil dibanding nilai LO Barang dan Jasa dengan nilai selisih sebesar 2.367.876. Perbedaan nilai merupakan selisih antara Belanja Jasa (Langganan Listrik dll) 2024 yang masih harus dibayarkan di

tahun 2025 dikurangi dengan beban Jasa (Langganan Listrik dll) 2023 yang sudah dibayarkan pada Januari 2024 sebesar 2.367.876 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Jasa (Langganan Listrik dll) 2024 yang masih harus dibayarkan di tahun 2025 senilai Rp.27,278,318:
 - 1. Belanja Listrik Desember 2024: Rp. 12.240.782
 - 2. Belanja langganan Daya dan Jasa Lainnya Desember 2024: Rp. 13.913.775
 - 3. Belanja Langganan Telepon Desember 2024: Rp. 841.716
 - 4. Belanja Langganan Air Desember 2024: Rp. 282.045
- beban jasa Jasa (Langganan Listrik dll) 2023 yang sudah dibayarkan pada Januari 2024 senilai Rp. 24,910,442:
 - 1. Belanja Listrik Desember 2023 : Rp. 12.555.800
 - 2. Belanja langganan Daya dan Jasa Lainnya Desember 2023: Rp.11.129.475
 - 3. Belanja Langganan Telepon Desember 2023: Rp. 390.165
 - 4. Belanja Langganan Air Desember 2023: Rp. 835.002

3) Nilai LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak lebih besar dibanding dengan nilai LO Pendapatan Negara Bukan Pajak dengan selisih senilai 18.653.817. Selisih tersebut merupakan nilai Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai 15,212,190 dan nilai Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai 3,441,627 yang tidak diakui di LO sebagai pendapatan operasional.

14. Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada Satker Balai Kawasan Konservasi perairan Nasional Kupang, Ditjen PKRL, KKP sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Unit Organisasi : Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Satuan Kerja : Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Program : Program Kualitas Lingkungan Hidup

Lokasi : Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	9.159.105.000	9.097.967.302	99,3%					
2362.PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.676.306.000	2.654.536.837	99,19%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%	
2362.PEE.001	Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	100.000.000	99.590.516	99,59%	1	3	Kesepakatan	100%	
2362.QEH.001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	320.000.000	293.328.210	91,67%	2	3	Kelompok Masyarakat	100%	
2362.REA.004	Oceans for Prosperity Project - Lautra	5.912.799.000	5.907.133.566	99,90%	4.039.437	4.039.437	Hektar	100%	
2362.REB.001	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	150.000.000	143.378.173	95,59%	1	1	Jenis	100%	
2366	Perencanaan Ruang Laut	300.000.000	290.763.926						
2366.PBT.009	Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	300.000.000	290.763.926	96,92%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%	
2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	13.546.023.000	13.395.639.801						
2367.EBA.956	Layanan BMN	143.954.000	76.355.950	53,04%	9	9	Layanan	100%	
2367.EBA.957	Layanan Hukum	315.000.000	310.484.962	98,57%	1	1	Layanan	100%	
2367.EBA.962	Layanan Umum	142.316.000	139.974.795	98,35%	1	1	Layanan	100%	
2367.EBA.994	Layanan Perkantoran	11.658.153.000	11.593.108.579	99,44%	2	2	Layanan	100%	
2367.EBB.994	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	150.000.000	150.000.000	100,00%	1	1	Unit	100%	
2367.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	384.000.000	383.921.387	99,98%	55	55	orang	100%	
2367.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	233.300.000	225.420.888	96,62%	1	1	Dokumen	100%	
2367.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	434.200.000	432.180.640	99,53%	1	2	Dokumen	100%	
2367.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	85.100.000	84.192.600	98,93%	1	1	Dokumen	100%	

15. Tahun 2024 terdapat anggaran yang pendanaannya bersumber dari PNBP senilai 800.000.000 yang tersebar pada KRO 2362.PBW - Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan senilai Rp. 650.000.000 dan pada KRO 2366.PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan senilai Rp.150.000.000. Rincian penggunaan sebagai berikut:

No.	KRO/ RO/ Komponen	Akun	Pagu	Realisasi	%
1	2362.PBW.001.065.OI	521211	17.466.000	17.382.175	99,52%
		522141	21.185.000	21.150.000	99,83%
		522151	900.000	900.000	100,00%
		522191	49.920.000	49.918.000	100,00%
		524111	136.600.000	136.505.139	99,93%
		524119	66.089.000	66.088.800	100,00%
	Sub Total		292.160.000	291.944.114	99,93%
2	2362.PBW.001.065.OJ	524111	357.840.000	351.446.059	98,21%
	Sub Total		357.840.000	351.446.059	98,21%
3	2366.PBT.009.052.OA	521211	25.884.000	25.577.200	98,81%
		522141	15.000.000	15.000.000	100,00%
		524111	24.864.000	24.153.375	97,14%
		524113	7.200.000	7.170.000	99,58%
	Sub Total		72.948.000	71.900.575	98,56%
4	2366.PBT.009.053.OA	521211	15.604.000	15.575.174	99,82%
		522141	17.100.000	17.100.000	100,00%
		524111	32.000.000	26.475.910	82,74%
		524113	12.348.000	12.340.000	99,94%
	Sub Total		77.052.000	71.491.084	92,78%
TOTAL			800.000.000	786.781.832	98,35%

1. 2362.PBW.001.065.OI Technical Meeting Penyediaan Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi pada tanggal 4 Maret 2024 di Kota Solo dengan realisasi senilai 291,944,114 dari pagu 292,160,000 atau sebesar 99,93%.
2. 2362.PBW.001.065.OJ Asistensi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemanfaatan Kawasan dengan realisasi kegiatan berupa Pendampingan Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kota Kupang, Pendampingan Lapangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Aset, pajak, Penyediaan Air Bersih di TWP Gili Matra.
3. 2366.PBT.009.053.OA Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut - Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut berupa Kegiatan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut-Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2024 dengan realisasi senilai 71,491,084 dari pagu 77,052,000 atau sebesar 92,78%.
16. Pada tahun 2024, BKKPN mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri World Bank atas proyek kegiatan Oceans for Prosperity Project – Lautra dengan pagu senilai

5,912,799,000 dan realisasi senilai 5,907,133,566 atau sebesar 99,90%.

Berikut rekap pelaksanaan kegiatan selama 2024:

- 1) Monitoring Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi (8 Kawasan)
- 2) Asistensi Pelaksanaan Pengelolaan Pemanfaatan Kawasan
- 3) Survei Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu
- 4) Survei Ekosistem di Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu
- 5) Survei Ekosistem dan Biota Laut Dilindungi di Kawasan Konservasi (7 Kawasan)
- 6) Monitoring Terumbu Karang Berbasis Masyarakat di Kawasan Konservasi (TNP Laut Sawu, Kapoposang, Laut Banda, Waigeo, Padaido)
- 7) Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemanfaatan Kawasan
- 8) Monitoring Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kawasan Konservasi (6 Kawasan)
- 9) Workshop Kajian Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi
- 10) Sinkronisasi Program Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Gili Matra
- 11) Penjangkauan Masyarakat dalam rangka penguatan pengelolaan Kawasan Konservasi (Gili Matra, Laut Sawu, Aru Tenggara)
- 12) Pengelolaan Biota Laut Dilindungi Berbasis Masyarakat di Kawasan Konservasi Kep. Kapoposang
- 13) Sosialisasi Pemangku Kepentingan dalam rangka pemanfaatan Kawasan Konservasi Kep. Padaido
- 14) Pengadaan Peralatan Pengolah Data Kawasan Konservasi